



LAPORAN PROYEK PERUBAHAN



Laditas

Layanan Adil DisabiliTAS
Peduli dan Setara

STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI PEMENUHAN AKOMODASI YG LAYAK

Nama : NI MADE PUJEWATI, S.I.K., M.M.
Nosis : 20240707012323
Jabatan : KASUBDIT IV
Instansi : DITRESKRIMUM POLDA NTB
Coach : Dr. Ir. MOMON RIVALI, M.Sc.
Mentor : KOMBES POL. SYARIF HIDAYAT, SIK., SH.

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TK II ANGGKATAN XXXI
TAHUN 2024

A. Latar Belakang

- ❑ Pasal 27 ayat 1 UUD RI 1945;
- ❑ UU no.8 th 2016 ttg penyandang disabilitas;
- ❑ Presiden : TNI-Polri harus menjadi pembelajar yang aktif, pembelajar yang adaptif, memperkuat profesionalisme, dan pelayanan terhadap masyarakat
- ❑ PP No 39 Th 2020 tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan. **menuntut adanya regulasi teknis** di masing-masing lembaga untuk implementasinya, namun **sampai saat ini Polri belum menerbitkan regulasi teknis yang memuat** aturan ttg sarana dan ruang yang aksesibel, SOP & penilaian personal serta kapasitas SDM yang menangani disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

PROSENTASE PENYELESAIAN PERKARA RENDAH

- ✓ Sarana dan prasarana yang tidak aksesibel, belum adanya SOP dan Penilaian Personal serta minimnya SDM yang kompeten menyebabkan penyelesaian perkara disabilitas berhadapan dengan hukum hanya 40%.
- ✓ Bareskrim menetapkan penyelesaian perkara diatas 65 %

KASUS DISABILITAS (TAHUN 2020-2024)



B. TUJUAN PROPER

Jangka Pendek



- ADANYA KESEPAHAMAN ANTARA POLDA NTB DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN KOMISI DISABILITAS DAERAH.
- ADANYA REGULASI DI TINGKAT POLDA TERKAIT PENANGANAN DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM.
- PENINGKATAN KAPASITAS SDM (SIMULASI) LAYANAN DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Jangka Menengah

- TERSEDIANYA SDM PROFESSIONAL YANG TERAMPIL DALAM PENANGANAN DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM (PELATIHAN).
- TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA YANG AKSESIBEL SERTA ANGGARAN PENYIDIKAN YANG MEMADAI UNTUK PENANGANAN DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM.

Jangka Panjang

1. LAPORAN PEMENUHAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

HASIL IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN



A. Capaian Hasil Perubahan

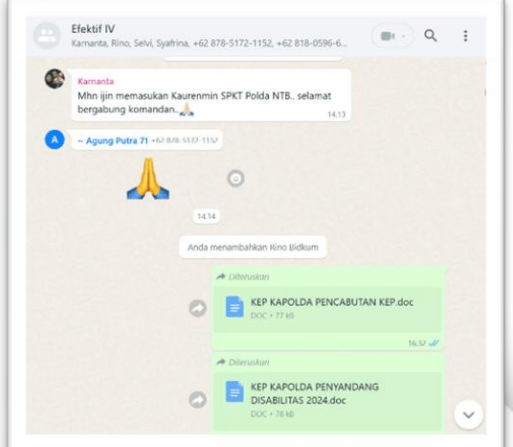
1. Terbentuknya tim efektif



Konsultasi, penyusunan langkah-langkah konkrit dalam persiapan dan percepatan implementasi Proper



Konsultasi Kabidkum



Mengajukan & Penetapan SK Kapolda NTB Penunjukan Tim Efektif

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

SUBAT PERINTAH KAPOLDA NTB
MABRIK SPDRN/STP/STSL/STG/STK
TANGGAL: 2-8 SEPTEMBER 2024

DAFTAR NAMA TIM EFEKTIF PENGELOMPOKAN MUDA DAN KEPOLISIAN KAPOLDA NTB

NO	NAMA	PANGKAT/NIP/NIP	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM POKJA
1.	SYARIF HEDAYAT, S.I.K., S.H.	KOMBESPOL/76101103	DIREKTORUM	PENANGGUNG JAWAB
2.	NI MADE PULERATI, S.I.K., M.M	AKBP/74207140	KASUBDIT 4 DITRESKRIMUM	KETUA
3.	ERY ARSUNANTO, S.H.	AKPI/72060012	PS KASLESBAGRENNIN BOKUM	ANGGOTA
4.	RINNO PRABOWO, S.H.	PENATA MUDA TK 1/19871112911911001	IPS PALRI 1 SUBDIBANWAL BOKUM POLDA NTB	ANGGOTA
5.	A.A. GDE PUTRA UDYANA SE	PEMBAWA/187103141996031003	KALUPRENAN SPKT POLDA NTB	ANGGOTA
6.	I GEDE KARNANTA, S.H	BRIGADIR / 91806022	SA SUBDIT 4 DITRESKRIMUM POLDA NTB	ANGGOTA
7.	SYAFRINA ROBBANA	BRIGADIR / 94880757	SA SUBDIT 4 DITRESKRIMUM POLDA NTB	ANGGOTA
8.	SELVA MERGA RAHAYU	BRIFTU / 90081982	SA SUBDIT 4 DITRESKRIMUM POLDA NTB	ANGGOTA

Dikeluarkan di: Mataram
pada tanggal: 2-8 September 2024
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NTB
WAKA
Dr. RUSLIAN ASPAN
Wakil Kepala Kepolisian Daerah NTB



Rapat dengan Satker terkait tentang pelaksanaan proyek perubahan & Pembentukan Tim Kerja Efektif

WAG Permudah Komunikasi dan koordinasi

A. Capaian Hasil Perubahan

2. Membangun Komitmen dukungan Stakeholders



Testimoni dukungan stakeholders eksternal

++ konsultasi dan koordinasi dgn stakeholders Internal

MILESTONE JANGKA PENDEK (SEPTEMBER s/d NOVEMBER 2024)



TERSEDINYA SARANA YG AKSESIBEL



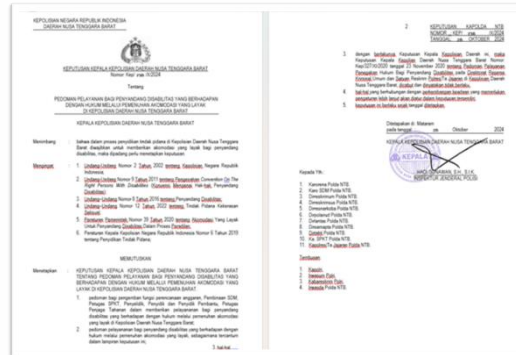
TERSELENGGARANYA SIMULASI/ PELATIHAN



TERTUANGNYA KESEPAHAMAN (MoU)



PENERBITAN & PEMBERLAKUAN KEUTUSAN KAPOLDA NTB



TERBANGUNNYA KOMITMEN BERSAMA IMPLEMENTASI PROPER



TERBENTUKNYA TIM EFEKTIF



INTERNAL

- TERBENTUKNYA MEKANISME PELAYANAN TERINTEGRASI YANG MEMBERIKAN DAMPAK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT OLEH POLDA NTB DAN JAJARAN SERTA PEMERINTAH PROVINSI NTB, SEHINGGA MEMPENGARUHI PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM.

EKSTERNAL

- MEMBERIKAN KONTRIBUSI BAGI PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA SE-NTB DALAM PELAYANAN DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MENUJU PROVINSI RAMAH DISABILITAS
- SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI PROG 100 HARI PERTAMA PEMERINTAHAN PRABOWO GIBRAN PADA PELAKSANAAN ASTA CITA, SASARAN PRIORITAS 8 "PENGUATAN KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, ANAK SERTA PENYANDANG DISABILITAS".

MANFAAT BAGI PESERTA

- MENGASAH KEMAMPUAN STRATEGIC LEADERSHIP, DENGAN MENGAMBIL PERAN AKTIF DALAM MERUMUSKAN REGULASI DAN MERANCANG KEGIATAN
- MENINGKATKAN HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDER TERKAIT
- MENUMBUHKAN JIWA KEBERSAMAAN
- MENINGKATKAN KEMAMPUAN ANALISIS DAN MENYUSUN SOLUSI DALAM MENGAKTUALISASIKAN MANAGEMENT STRATEGIC.



HASIL IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

C. Deskripsi Proses Kepemimpinan Strategis



Membangun kerjasama

- Pihak Internal
- Pihak Eksternal

Memanfaatkan peluang

- Menjangkau Stakeholders Jajaran Melalui Zm
- Memanfaatkan Sosialisasi KDD untuk Simulasi/ Pelatihan Terintegrasi
- **Menjadikan Laditas Sbg Ruang Bagi Dunia Usaha Untuk Melaks Giat Sosial /CSR (Implementasi KPP)**

Manfaatkan Sumber daya

- Sdm Internal, Tim Efektif Dikelompokkan Menjadi 3 Tim
 1. Koordinasi & Adm
 2. Tim Perumusan Regulasi
 3. Tim Analisa Serta Pelaporan
- TI Yang Ada Disatukan Kerja Masing-masing



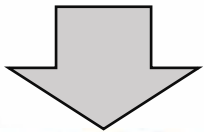
HASIL IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

D. Implementasi Strategi Marketing



Laditas

Layanan Adil Disabilitas
Peduli dan Setara



Neraca mewakili keadilan, hukum.



Mata Cacat mewakili disabilitas, grup inklusi



Senyuman mewakili kepuasan pelayanan



Dua Orang Terhubung mewakili mitra / rekasi



Mata Rantai mewakili hubungan, berkesinambungan



HASIL IMPLEMENTAS PROYEK PERUBAHAN

D. Implementasi Strategi Marketing



TribunLombok.com Sosial NTB

Pj Gubernur Sambut Baik Kerja Sama dengan Polda NTB dalam Penanganan Kasus Hukum Bagi Disabilitas

Tayang: Kamis, 31 Oktober 2024 13:29
WITA

Editor: Laelatunniam

Pj. Gubernur NTB Hassanudin menerima kunjungan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Kamis (31/10/2024).

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pj. Gubernur NTB Hassanudin menerima kunjungan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Kamis (31/10/2024).

Kombes Pol Syarif Hidayat didampingi oleh

BIROADPIMNTB Postingan

biroadpimntb
Pendopo Gubernur Ntb

Pemprov NTB Sambut Kiprah Komisi Disabilitas Daerah
"Kami Pemerintah Provinsi siap bekerjasama dan memfasilitasi kebutuhan para disabilitas," ujar Pj. Gubernur Hassanudin.

28

biroadpimntb Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin menyambut baik langkah Komisi Disabilitas Daerah (KDD) dalam pendampingan proses hukum penyandang disabilitas.

"Kami Pemerintah Provinsi siap bekerjasama dan memfasilitasi kebutuhan para disabilitas," ujar Pj. Gubernur Hassanudin di Pendopo Gubernur NTB, Kamis, 31 Oktober 2024.

SIMULASI KUATKAN SINERGI PELAYANAN DISABILITAS

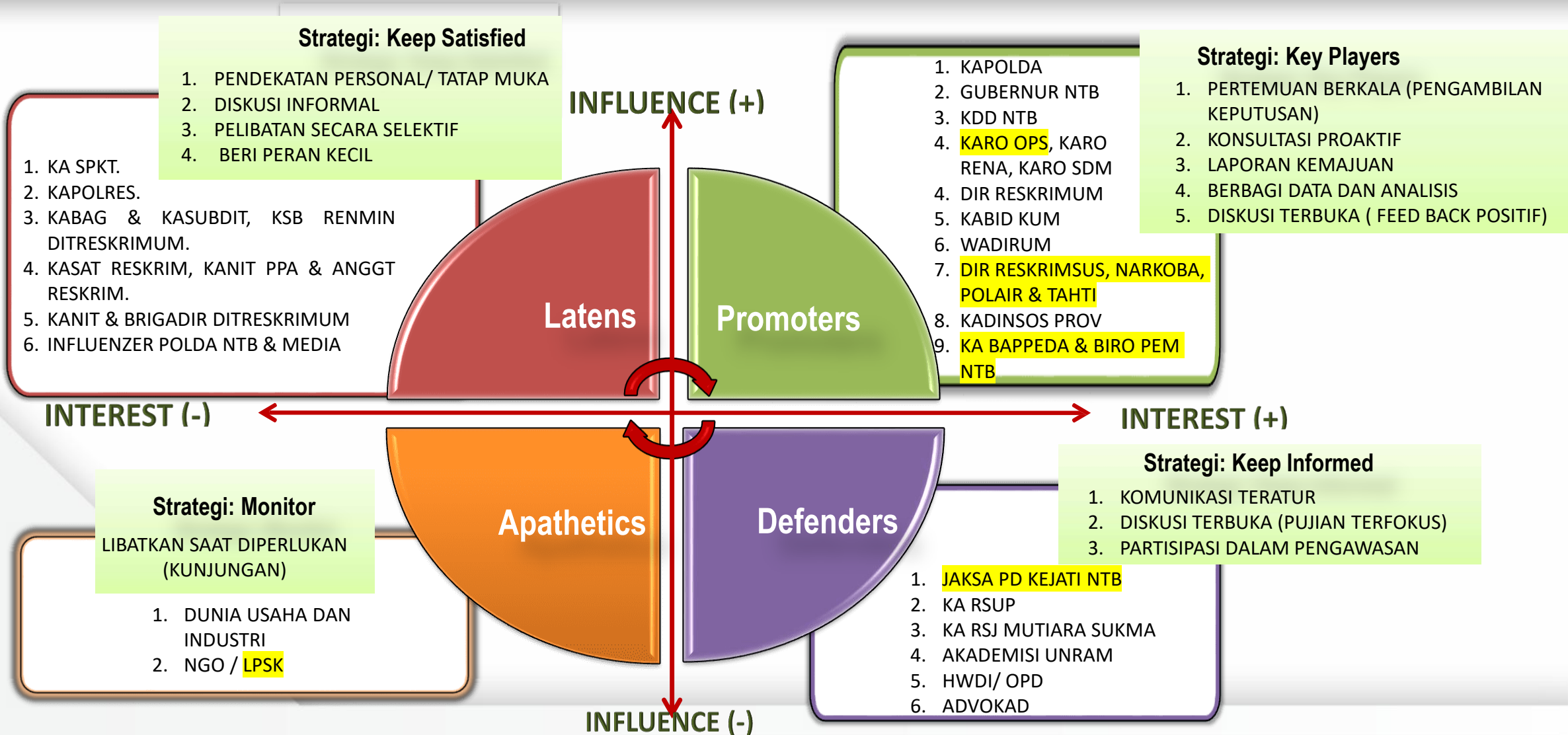
Pj. Gubernur NTB Hassanudin, terkait rencana penanda tangan MOU antara Pemprov NTB dengan Polda NTB dan Komisi Disabilitas Daerah NTB, dinas sosial NTB bersama Polda NTB dan Komisi Disabilitas Daerah NTB mengadakan FGD yang dihadiri oleh pihak Kejati NTB, Pengadilan Tinggi NTB, Pengadilan Tinggi Agama NTB, Biro SDM, Reskrim dan Reskrimus Polda NTB, Perwakilan Polres Kepulauan Lombok, Dinas Sosial Kab/Kota, Perwakilan Organisasi Disabilitas NTB, Perwakilan Lembaga Kesejahteraan Sosial Disabilitas, Pendamping sosial Reshos Dinas Sosial, Dan TKSK yang bertempat di Aula Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandala Dinas Sosial NTB.

Hadir juga sebagai Pemateri dari Komisi Disabilitas Daerah NTB, Yan Mangarad, SH, MH dan Kasubdit IV Remaja, Anak dan Wanita Reskrimus Polda NTB, AKSP Ni Made Pujawati. Sementara itu Kepala Dinas Sosial NTB, Dr. Ahsanul Khaliq pada kesempatan ini dalam arahnya menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk bersinergi dengan semua pihak dalam penanganan dan pelayanan disabilitas, termasuk dalam penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum baik penyiapan Pendamping Pekesos, Ahli bahasa isyarat, juga mengaksakan dengan psikolog. Demikian halnya terkait kesiapan UPT dan RPTC untuk layanan disabilitas.

Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, Kepala Dinas Sosial NTB menyampaikan terimakasih kepada Polda NTB, Komisi Disabilitas Daerah NTB, semua Lembaga/Instansi dan Organisasi penyangga Disabilitas yg telah bersama pemerintah membangun sinergi ini, yang juga dalam waktu dekat akan ada MOU antara Gubernur NTB, Kapolda NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah NTB terkait pemenuhan kebutuhan layak untuk layanan disabilitas yang berhadapan dengan hukum.



STAKEHOLDERS DALAM IMPLEMENTARI PR



HASIL IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

E. Keberlanjutan



JANGKA
PENDEK

JANGKA
MENENGAH

JANGKA
PANJANG

6 BULAN

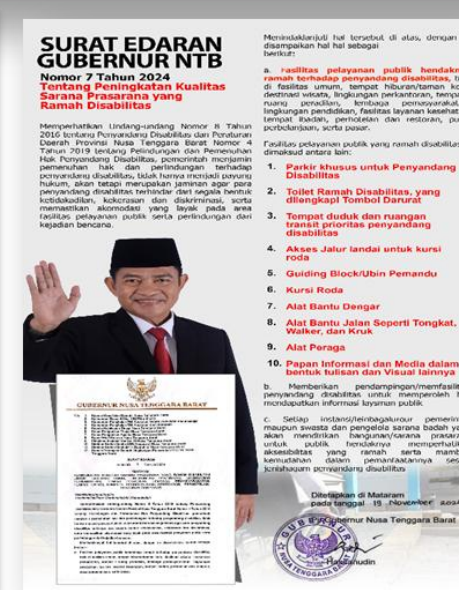
MENINGKATNYA KAPASITAS SDM
TERSEDINYA SARANA & RUANG YANG AKSESIBEL

SDM

PELAKSANAAN PELATIHAN /PENINGKATAN KAPASITAS SDM PROFESSIONAL YANG TERAMPIL DALAM PENANGANAN DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM;

SARANA

PELAKSANAAN ADVOKASI INTERNAL SARANA/PRASARANA YANG AKSESIBEL SERTA ANGGARAN DI LINGKUNGAN POLDA NTB DAN JAJARAN;
PELAKSANAAN ADVOKASI PENYEDIAAN SARANA YG AKSESIBEL MELALUI ANGGARAN CSR.



1 TAHUN

- TERSEDINYA AKOMODASI YANG LAYAK BAGI DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM,
- TERSEDINYA LAPORAN PEMENUHAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

POLRES SUMBAWA



TOILET AKSESIBEL



HASIL IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

F. Pemberdayaan Organisasi Belajar



PEMANFAATAN SUMBERDAYA ORGANISASI:

TATA KELOLA (TERSTRUKTUR DGN JABARAN TUGAS).
SARANA DAN PRASARANA, TEKNOLOGI & ANGGARAN

Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi:

Pengembangan potensi diri

Pengembangan kompetensi pribadi, tim dan stakeholders



Mentoring dan Coaching , menghadirkan Ahli Psikologi dalam Penanganan Kasus Disabilitas yang sedang ditangani

24 Oktober 2024

- Bersama mentor mengikuti sosialisasi ttg membangun system perlindungan inklusif bagi saksi dan korban yang sejalan dengan proyek perubahan.



Dialog Bersama LPSK RI, mengarahkan mekanisme perlindungan seerta layanan bagi saksi & korban termasuk penyandang disabilitas.

HASIL IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

F. Pemberdayaan Organisasi Belajar



PENANGANAN PERKARA TPKS
PELAKU PENYANDANG DISABILITAS





1. KESETARAAN GENDER & INKLUSI SOSIAL

MEMAHAMI KEPEMIMPIN INKLUSIF DALAM RANGKA MEMAJUKAN GEDSI (GENDER, DISABILITY & SOCIAL INCLUSION), DENGAN MENGIDENTIFIKASI UPAYA UNTUK MEMBANGUN PEMIMPIN DAN TIM YANG INKLUSIF

- Pengetahuan ini menuntun penulis untuk memastikan bahwa dengan pembangunan yang inklusif, semua pihak dengan kebutuhan yang berbeda mendapatkan manfaat yang sesuai, yakni
- Persamaan (equality), Ekuitas (equity) & Keadilan (justice).



2. HAK ASASI MANUSIA

PEMENUHAN, PERLINDUNGAN DAN PENGHORMATAN HAM, MESTI DIJALANKAN OLEH BANGSA YANG BERADAB

- Manusia berhak untuk menikmati hak-hak asasi mereka tanpa pembedaan dalam bentuk apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, sosial, harta, kelahiran atau status lainnya.
- Memantapkan project leader dalam merumuskan langkah strategis dalam mencapai tujuan proyek perubahan

3. MANAJEMEN PEMERINTAHAN

SUATU KEGIATAN ATAU USAHA UNTUK MENCAPAI TUJUAN NEGARA DENGAN MENGGUNAKAN BERBAGAI SUMBER YANG DIKUASAI OLEH NEGARA

- Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan yang melaksanakan tugas sesuai dengan unit kerja yang dibentuk untuk melayani masyarakat dengan mengefektifkan sumberdaya dan mengolah sumberdaya yang ada.

- a. Selama proyek perubahan ini dilaksanakan, menyadari tugas berat sebagai pemimpin. Bagaimana mengkomunikasikan dengan stakeholder eksternal yang memiliki kesibukan yang padat, serta setiap saat harus menyiapkan data dan fakta untuk disampaikan/ dilaporkan;
- b. Membangun kerjasama kolaboratif dengan partisipasi/ keterlibatan aktif seluruh stakeholder dan anggota tim efektif yang dibangun sejak perencanaan/rancangan adalah engine yang kecepatannya hanya dapat dipacu melalui komunikasi aktif, persuasif, terbuka dan intensif. Sehingga kemampuan komunikasi dan argumentasi project leader menjadi semakin terasah dengan baik;



- c. Menjadikan inovasi bagian dari daily life bagi project leader dan tim di organisasi (adaptasi terhadap situasi dan kondisi). Perubahan sangat cepat dan tidak terduga yang sulit dikontrol, termasuk di dalamnya tuntutan peningkatan kualitas layanan penegakan hukum, perkembangan teknologi dan informasi serta pesatnya perkembangan media sosial yang harus dapat dikuasai dan dimanfaatkan secara maksimal untuk mempermudah pekerjaan;
- d. Pentingnya organisasi pembelajar (learning organization) dimana project leader dan tim harus melewati proses belajar yang terus menerus secara mandiri untuk menghadapi hambatan/kendala dalam implementasi proyek perubahan (waktu yang singkat, sumberdaya manusia dan anggaran yang terbatas), untuk bersama-sama mencari jalan keluar demi mencapai tujuan;

A. KESIMPULAN

1. Seluruh tahapan implementasi dan output dalam rencana jangka pendek telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan milestone yang direncanakan.
2. Tujuan jangka pendek dalam proyek perubahan ini dapat dicapai seluruhnya dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyelesaian yang direncanakan.
3. Monitoring dan evaluasi periodik tetap dilakukan agar keberlanjutan pelaksanaan jangka pendek dapat dilanjutkan dengan rencana jangka menengah dan jangka Panjang.

B. TINDAK LANJUT

Membangun komunikasi yang efektif dengan semua stakeholder baik internal maupun eksternal untuk :

1. Menyelenggarakan pelatihan/ peningkatan kapasitas SDM professional oleh Ditreskrimum serta melakukan advokasi pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan Biro SDM Polda NTB dan Dinas/ Lembaga terkait.
2. Melaksanakan advokasi internal sarana/prasarana yang aksesibel serta anggaran untuk penanganan Disabilitas Berhadapan dengan Hukum di Polda NTB dan Jajaran
3. Melaksanakan advokasi penyediaan sarana yg aksesibel di satuan kerja dan Polres jajaran melalui dukugan CRS/ Public privat partnership.
4. tersedianya laporan pemenuhan akomodasi yang layak bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum, yang mempengaruhi peningkatan penyelesaian perkara.



Laditas
Layanan Adil Disabilitas
Peduli dan Setara

Terima Kasih



A. Capaian Hasil Perubahan

2. Dukungan Stakeholder Eksternal



- Dukungan dari Komisi Disabilitas Daerah NTB
- Menerima masukan terkait materi dalam MoU dan Kep Kapolda



- Dukungan Kadinsos Prov NTB, Direktur RSUP NTB dan Jaksa Kejati NTB
- Menerima masukan terkait materi dalam MoU dan Kep Kapolda

A. Capaian Hasil Perubahan

3. Perumusan Draft MOU dan Keputusan Kapolda Oleh Tim Efektif



Inventarisir masalah & materi dalam draft MoU dan Keputusan Kapolda



Finalisasi Draft

- ✓ Pemenuhan akomodasi dengan ruang lingkup adanya standar pelayanan di SPKT, adanya standar pemeriksaan, pembuktian, Kapasitas SDM, koordinasi dan Kerjasama, monitoring dan evaluasi serta pendanaan pemenuhan akomodasi
- ✓ Adanya keterkaitan dengan satker : Ro rena, Ro SDM, Ditreskrimum, SPKT.

A. Capaian Hasil Perubahan

4. - Pembahasan Dengan **KDD Dan Satker Lain Tingkat Polda NTB**
 - Pembahasan Dengan Bidkum Dan Satker Lain Tingkat Polda NTB



- ✓ **Saat implementasi Proper**, Ditreskrim dan Ditreskrimsus menerima perkara yang melibatkan Disabilitas, menyadari bahwa ruang lingkup harus diperluas;
- ✓ **Draft Keputusan Kapolda direvisi.**

A. Capaian Hasil Perubahan

5. PEMBAHASAN DRAFF MOU DENGAN OPD PROV NTB DAN KDD



- ✓ OPD terkait dan Komisioner KDD Menyetujui Draft MoU
- ✓ Konsultasikan waktu pelaksanaan penandatanganan dengan PJ Gub NTB

6. Focus Group Discussion



Rapat persiapan

Pelaksanaan



- Mendapatkan saran masukan, sebagai bentuk integrasi layanan dalam penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

- Memberikan pemahaman dan mendapatkan masukan yang dipersiapkan dalam penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

7. Persiapan Penandatanganan MOU dan Peraturan Kapolda



25 Oktober 2024

- Kapolda dan Ketua LPSK RI mendukung proper
- Kapolda NTB menyetujui draft MoU, Keputusan Kapolda dan Rencana simulasi/ Pelatihan



31 Oktober 2024

- PJ GUB NTB mendukung proper peningkatan kualitas layanan bagi penyandang disabilitas.
- PJ GUB NTB menyetujui draft MoU dan waktu penandatanganan di tgl 4 Nov 2024

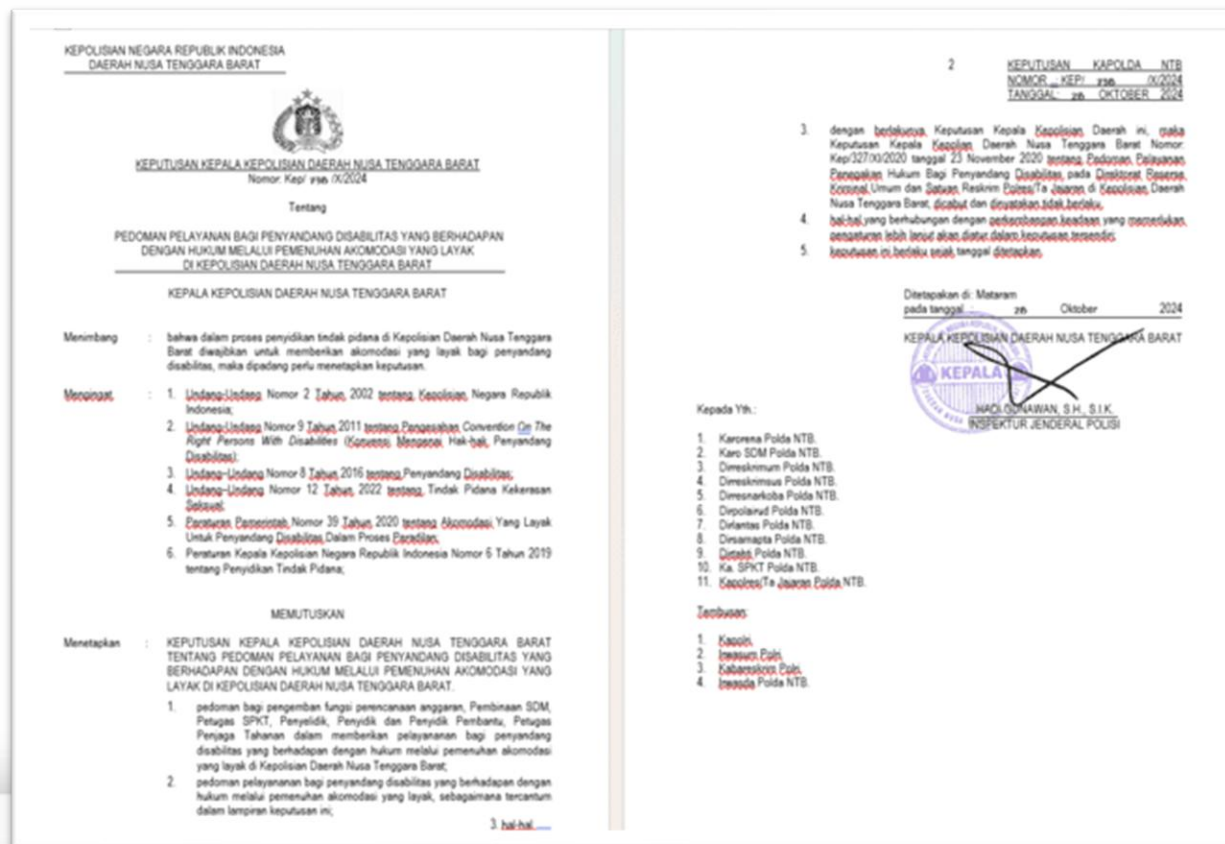
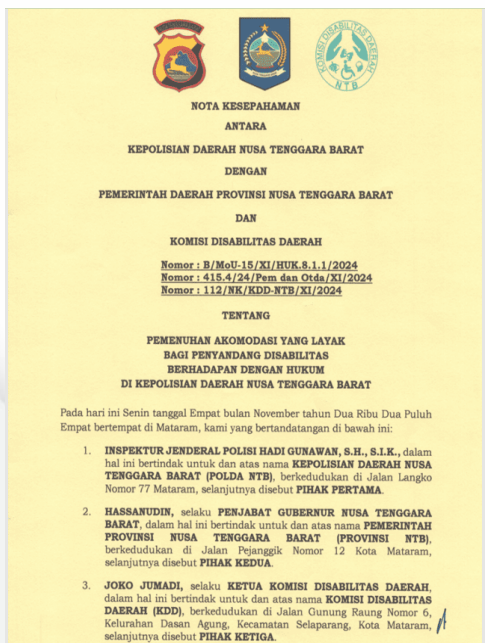
HASIL IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

A. Capaian Hasil Perubahan

7. Penandatanganan MOU dan Peraturan Kapolda

MoU Kapolda NTB dengan Gubernur NTB dan Komisi Disabilitas Indonesia

Keputusan Kapolda NTB Nomor: Kep/ **738** /X/2024, tgl 28 Okt 2024 Ttg Pedoman Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pemenuhan Akomodasi Yang Layak Di Kepolisian Daerah NTB



HASIL IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

A. Capaian Hasil Perubahan

9. Simulasi/Pelatihan Terintegrasi



Peserta Mendukung serta Menindaklanjuti MOU dan Kep Kapolda

MILESTONE JANGKA PENDEK (SEPTEMBER s/d NOVEMBER 2024)



TARGET KEGIATAN

